

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan dan perempuan ibarat potret dalam sebuah mata uang, berbeda tapi tidak dapat dipisahkan. Bahkan kemiskinan sering digambarkan dalam sosok perempuan renta yang sedang membawa beban dipunggungnya. Gambaran tersebut merupakan cermin bahwa kemiskinan sangat dekat dengan perempuan atau dalam bahasa lain wajah kemiskinan adalah wajah perempuan (Cahyono, 2005).

Kondisi yang timpang ini, mendorong para ahli untuk mencari akar persoalan dan menemukan solusi agar kondisi perempuan menjadi lebih baik. Salah satunya adalah faham *feminisme sosialis* yang meyakini bahwa perempuan tidak dapat difahami secara terpisah dari ketimpangan kelas dan struktur yang terjadi dalam masyarakat kapitalis (Felsky, 2002). Faham ini mengkaitkan kemiskinan perempuan dengan dominasi laki-laki (patriarki) dan sistem kapitalis. Dalam hal ini Saptari dan Holzner (2016) melihat kemiskinan perempuan disebabkan oleh dominasi laki-laki melalui sistem pembagian kerja secara seksual yang merupakan produk kapitalis.

Pembagian kerja secara seksual ini bermula ketika industri masuk dalam kehidupan masyarakat dan menjadi kegiatan ekonomi yang dominan. Dalam dunia industri yang identik dengan mesin dan alat berat sangat dibutuhkan tenaga fisik yang kuat dan hal ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Kelebihan dalam hal fisik ini menjadikan laki-laki sebagai satu-satunya aktor dalam kegiatan publik dan produksi. Sementara itu perempuan yang dianggap lebih lemah fisiknya diposisikan melakukan pekerjaan di sekitar rumah tangga yang bersifat domestik dan reproduksi. Dengan adanya pembagian kerja tersebut menempatkan kegiatan ekonomi sebagai

ranahnya laki-laki dan kegiatan non ekonomi sebagai ranahnya perempuan. Hal ini menyebabkan setiap kegiatan perempuan baik itu yang berhubungan dengan kegiatan di sekitar rumah tangga ataupun bekerja di luar rumah dianggap bukan sebagai bagian kegiatan ekonomi. Kegiatan perempuan dalam rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah dianggap sebagai tugas utama perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga yang tidak memberikan dampak langsung terhadap ekonomi rumah tangga.

Industrialisasi juga semakin mempersempit lapangan pekerjaan perempuan. Pada masyarakat agraris perempuan terlibat dalam faktor produksi sejak pemilihan benih, pembibitan, pengolahan lahan sampai pada mengutip hasil serta memanfaatkan hasilnya. Belakangan, perubahan pada pertanian subsisten ke sistem pasar dan berkembang dalam sistem kapitalis menyebabkan perempuan yang tadinya terlibat secara langsung berangsur-angsur mulai terpinggirkan dan kemudian ditinggalkan.

Dengan alasan meningkatkan produktifitas hasil pertanian, industri-industri besar memproduksi segala macam alat dan bahan yang berkaitan dengan pertanian. Mulai dari yang kecil seperti cangkul hingga yang sangat besar seperti traktor atau mesin pemotong padi. Industri juga menyediakan berbagai macam pupuk untuk menyuburkan tanaman dan obat-obatan untuk menghilangkan hama dan penyakit. Hasilnya memang memuaskan, produktifitas pertanian naik sampai dua kali lipat, namun dampaknya terhadap perempuan sangat besar. Perempuan kehilangan pekerjaannya. Kebutuhan terhadap bibit, pupuk dan obat-obatan yang tadinya diproduksi sendiri sekarang sudah bisa dipenuhi dengan membeli di pasar. Alat dan teknologi pertanian juga semakin meminimalkan jumlah tenaga kerja. Selain itu alat

dan teknologi tersebut tidak ramah perempuan sehingga yang bisa menggunakannya hanya laki-laki.

Perempuan tidak lagi bisa memainkan peranannya dalam pertanian. Mau tidak mau mereka kemudian terjun ke dunia industri. Mereka beramai-ramai menjadi buruh pabrik ataupun buruh toko. Di dunia industri ini ternyata mereka juga menghadapi banyak persoalan. Mulai dari gegar budaya karena harus meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, mendapatkan upah yang lebih kecil dari laki-laki, serta tidak mendapatkan cuti haid dan melahirkan.

Dengan demikian kemiskinan dan feminisasi kemiskinan bukan sekedar persoalan ekonomi atau persoalan budaya semata. Lebih dari itu ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu persoalan struktural. Struktur yang ada didominasi oleh sebahagian anggota masyarakat dan mereka menguasai sarana ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Faktor struktural inilah yang menyebabkan sebahagian anggota masyarakat tidak memiliki akses terhadap sarana dan sumberdaya yang ada, sementara ada sekelompok masyarakat yang dominan terhadap berbagai sarana dan sumberdaya tersebut. Hal ini memunculkan sebuah bentuk relasi yang timpang dan inilah yang dialami oleh perempuan (Venny, 2005).

Relasi yang timpang ini, menurut Saptari dan Holzner (2016) bersumber pada ideologi patriarki, yaitu nilai-nilai yang selalu memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat, dimana laki-laki berkuasa atas perempuan dan anak-anak. Ideologi ini menurut Engels (dalam Felsky, 2002) bersumber pada kepemilikan pribadi dan pewarisan, yang berujung pada pengaturan jenis kelamin perempuan dalam keluarga.

Dengan demikian rumah tangga adalah salah satu sumber penyebab diskriminasi dan subordinasi pada perempuan. Dalam rumah tangga, kepemilikan akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya sangatlah terbatas, yaitu seputar aset domestik. Seumpama peralatan dapur ataupun peralatan rumah tangga lainnya. Berbeda bila sumberdaya tersebut merupakan aset publik seperti kendaraan, tanah dan rumah maka yang bisa mengaksesnya adalah laki-laki. Kepemilikan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang terbatas ini menyebabkan perempuan lebih miskin dari laki-laki (Noerdin, 2006).

Lebih lanjut, Noerdin (2006) menyebutkan lima aspek yang menyebabkan terjadinya feminisasi kemiskinan di dalam rumah tangga yaitu: (1) akses terhadap sumber produktif, seperti tanah, modal, hak kepemilikan, kredit, serta pendidikan dan pelatihan; (2) kontrol terhadap penggunaan tenaga kerja keluarga; (3) pembagian kerja yang tidak seimbang akibat adanya beban kerja reproduktif yang diemban perempuan; (4) perbedaan konsumsi makanan, obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan; (5) dan perbedaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Demikian juga halnya dalam masyarakat, kemiskinan pada perempuan erat hubungannya dengan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam forum-forum publik yang bersifat politis dan ekonomis. Dalam kerja pembangunan, perempuan selalu ditinggalkan. Pembangunan hanya melibatkan laki-laki yang dianggap memiliki dan dapat mengakses sumberdaya dalam segala bidang baik politik, sosial dan ekonomi. Ketiadaan akses dan kontrol terhadap sumberdaya telah menyebabkan perempuan dipinggirkan dari pembangunan.

Noerdin (2006) menyebutkan ada sembilan aspek yang menyebabkan terjadinya feminisasi kemiskinan di dalam masyarakat yaitu: (1) akses perempuan terhadap politik; (2) akses perempuan terhadap pekerjaan; (3) akses perempuan terhadap upah yang sama; (4) akses perempuan terhadap tanah (aset produksi); (5) akses perempuan pekerja terhadap perlindungan hukum; (6) akses perempuan terhadap layanan kesehatan produksi; (7) akses perempuan terhadap pendidikan; (8) minimnya alokasi anggaran pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan; (9) beban pekerjaan perempuan yang tinggi.

Kesemua aspek tersebut oleh Saptari dan Holzner (2016) dirangkum dalam tiga istilah yaitu: marjinalisasi, domestikasi, dan pengiburumahtangaan. Proses marjinalisasi berarti mengucilkan perempuan dari kerja upahan atau dari jenis kerja upahan tertentu. Dengan demikian ruang gerak perempuan hanya terbatas pada urusan domestik rumah tangga. Domestikasi perempuan ini sangat penting karena perempuan dibutuhkan untuk mengatur rumah tangga dan menjaga anak-anak. Perempuan sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga dan tergantung pada laki-laki yang menafkahnya.

Ideologi patriarki telah menjauhkan perempuan dari kepemilikan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya serta menyebabkan perempuan berada dalam kemiskinan. Sebagaimana yang dilihat Tsing (1998) pada masyarakat Dayak Meratus. Tsing melihat ideologi patriarki yang diwakili oleh laki-laki, pejabat negara, perusahaan global, dan agama dominan menyebabkan termarjinalnya masyarakat Meratus. Masyarakat Meratus mendapatkan pelabelan negatif dan harus tersingkir dari hutan mereka. Kepemilikan, akses, dan kontrol mereka terhadap hutan secara berangsur diambil alih oleh negara dan diserahkan pada perusahaan

global. Masyarakat menjadi miskin sementara kekayaan mereka dibawa ke luar oleh perusahaan global. Kondisi ini membuat Uma Adang seorang dukun perempuan mengambil alih bentuk kepemimpinan lokal dan melakukan perlawanan dalam bentuk protes. Penelitian Tsing ini memang tidak sepenuhnya berbicara mengenai perempuan dan kemiskinan, namun dengan menggunakan etnografi feminisme dan menjadikan Uma Adang sebagai informan maka persoalan ketimpangan relasi antara masyarakat Meratus dengan masyarakat global menjadi menarik.

Kilwouw (2014) menyebutkan proses penyingkiran masyarakat adat dari sumberdaya alam yang dimilikinya sama seperti konstruksi sosial yang mendudukan perempuan sebagai kelas nomor dua. Kilwouw melihat dengan masuknya perusahaan tambang emas ke Maluku Utara, menjadikan perempuan semakin miskin. Areal pertambangan telah mengambil alih kebun dan menjadikan perempuan sebagai pengangguran. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, perempuan terpaksa mencari dan membuka lahan baru yang jauh dari pemukiman atau menjadi pemecah batu di areal tambang.

Demikian juga yang dilihat oleh Kartika (2014) pada masyarakat Penago, Bengkulu. Perusahaan tambang pasir besi global telah merusak alam dan menjadikan perempuan kehilangan mata pencaharian. Melihat kondisi ini perempuan Penago tidak tinggal diam atau sekedar protes. Mereka bangkit melakukan perlawanan. Bahkan perlawanan yang mereka lakukan sampai pada taraf menyerang kelamin laki-laki. Perlawanan yang mereka lakukan dengan menyerang alat kelamin ini adalah simbol menghancurkan maskulinitas yang menjadi representasi kekuasaan sekaligus simbol terhadap penghancuran kekuasaan global yang eksploitatif.

Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, Syafrizaldi (2015) melihat perempuan-perempuan desa yang miskin dan jauh dari gegap gempita pembangunan tidak selamanya tertindas dan takluk pada ideologi patriarki. Terlihat pada perempuan Lubuk Beringin, sebuah desa kecil yang berada di pinggir Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi. Mereka dengan caranya yang sederhana telah mengorganisir diri dan membentuk sebuah koperasi untuk melawan kemiskinannya. Bahkan bagi mereka koperasi ini tidak sekedar tempat berkumpul dan mengakumulasi modal namun merupakan jawaban terhadap gagalnya proses pembangunan yang dilakukan oleh laki-laki.

Proses feminisasi kemiskinan telah membuat perempuan melakukan perlawanan. Bentuk perlawanannya macam-macam tergantung pada bagaimana relasi gender, lokasi, serta budaya masyarakatnya. Ada yang melawan melalui simbol-simbol budaya seperti yang dilakukan oleh Uma Adang. Yaitu dengan menggunakan kesaktiannya sebagai dukun. Ada juga yang melakukan protes dengan memakai tubuhnya seperti yang dilakukan para perempuan Penago yang membuka baju dalam aksinya, bahkan sampai melakukan perlawanan fisik dengan menyerang kelamin laki-laki. Ada juga yang melakukan perlawanan melalui penguatan organisasi seperti yang dilakukan oleh perempuan di Lubuk Beringin.

Demikian pula yang dilakukan oleh perempuan miskin di Kelurahan Lubuk Raya. Mereka melakukan perlawanan dengan mendirikan organisasi dan turut aktif dalam kegiatan pembangunan. Secara spesifik penelitian ini merujuk pada tulisan Syafrizaldi di Lubuk Beringin tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari beberapa kajian tersebut terlihat bahwasanya ideologi patriarki telah membuat relasi gender berjalan secara tidak adil. Perempuan selalu dinomorduakan serta dijauhkan dari akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Akibatnya perempuan menjadi miskin dan harus menerima beban ganda baik dalam bidang produksi, reproduksi, dan sosial.

Dalam bidang produksi perempuan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, mengalami berbagai ketidakadilan seperti upah yang lebih rendah. Begitu juga dalam hal reproduksi. Bidang ini seolah-olah hanya milik perempuan dan laki-laki pantang untuk mencampurinya. Setelah bekerja di luar rumah, perempuan masih juga berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya waktu yang dimiliki perempuan habis seluruhnya untuk melayani keluarga dan orang lain. Hampir tidak ada waktu yang dimiliki oleh perempuan untuk dirinya sendiri. Padahal perempuan juga butuh waktu untuk bersosialisasi dan terlibat dalam agenda masyarakat, namun karena beban pekerjaan yang tinggi menyebabkan perempuan terjebak dalam pekerjaannya. Ketidakhadiran perempuan dalam ranah sosial ini semakin diperparah dengan adanya sistem perwakilan. Kehadiran perempuan cukup diwakili oleh suami termasuk dalam hal menyatakan pendapat ataupun usulan dalam pembangunan. Tidak mengherankan bila kemudian banyak produk kebijakan ataupun pembangunan yang merugikan perempuan.

Begitu pula yang dialami oleh perempuan di Kelurahan Lubuk Raya. Mereka harus bekerja di dalam dan luar rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Di dalam rumah tangga mereka berkewajiban untuk mengurus seluruh aktifitas rumah mulai dari masak, mencuci dan menjaga anak. Aktifitas rumah tangga ini mereka mulai

sejak Subuh. Bangun tidur mereka langsung pergi ke dapur dan sumur untuk menyiapkan sarapan dan mencuci baju. Urusan dapur dan sumur ini selesai ketika semua orang sudah pergi dari rumah, namun bukan berarti mereka bisa beristirahat, babak selanjutnya sudah menanti yaitu melakukan aktifitas ekonomi.

Pekerjaan yang mereka lakukan pada umumnya bersifat informal ada yang menjadi petani penggarap, pemulung, pedagang sayur, pedagang keliling, buka warung, pembantu rumah tangga, pekerja rumahan, dan tukang kredit (bakri). Bahkan ada beberapa diantara mereka yang mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Jenis pekerjaan mereka boleh beda namun nasib mereka sama. Mereka sama-sama dijauhkan dari akses dan sumberdaya. Mereka sama-sama mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, dan stereotip. Padahal bagi sebahagian perempuan di Lubuk Raya, pekerjaan yang mereka lakukan di luar rumah tersebut bukan lagi sekedar membantu ekonomi keluarga akan tetapi sudah menjadi sumber pendapatan keluarga. Pekerjaan yang tadinya hanya membantu suami sekarang telah menjadi pekerjaan utama.

Beberapa dari mereka tampak melakukan aktifitas ekonomi ini secara santai karena melakukan usahanya di dalam rumah seperti membuka warung jajanan atau menjadi pekerja rumahan. Mereka tidak perlu meninggalkan rumah untuk menjalankan ekonominya sehingga mereka bisa melakukan aktifitas yang lain. Hanya saja usaha yang hampir tidak ada resikonya ini membutuhkan kesabaran dan upahnya juga tidak begitu besar. Kendala terbesar dari usaha ini adalah akses terhadap permodalan. Bahkan beberapa diantaranya tidak bisa bertahan lama karena bahan dagangan habis dimakan sendiri.

Lain lagi dengan yang membuka *kede sampah* (toko kelontong) atau warung makanan walaupun sama-sama berada di rumah namun pekerjaan ini bukan lagi pekerjaan yang bisa dianggap ringan. Mereka harus melakukannya lebih serius karena membutuhkan waktu, tenaga dan modal yang cukup. Untuk menyiapkan dagangannya perempuan-perempuan ini harus memulainya sejak dini hari. Dalam menjalankan usahanya ini mereka kadang dibantu oleh suami ataupun anak yang sudah besar, seperti mengantar dan menjemput ke *pajak* (pasar).

Lain lagi yang dialami oleh petani penggarap. Pekerjaan yang berat ini sekarang sudah lebih ringan karena dibantu oleh teknologi pertanian, bahkan dalam hal tertentu mereka tidak melakukannya secara langsung, namun menggunakan jasa orang lain. Seperti membajak sawah atau pada saat memanen mereka menggunakan jasa mesin yang telah disediakan oleh kelompok tani. Sehingga dalam menjalankan aktifitas ini mereka tidak mengalami kendala yang sifatnya teknis. Justru kendala yang mereka hadapi ketika harus berhadapan dengan kelompok tani. Sebagai petani penggarap mereka tergabung dalam kelompok tani namun mereka tidak mendapatkan hak yang sama seperti petani lainnya. Banyak bantuan yang diberikan pemerintah untuk kelompok tani yang tidak dapat mereka akses. Terutama bantuan dalam bentuk pinjaman modal, pengurus menganggap perempuan petani penggarap tidak akan mampu untuk mengembalikan modal yang dipinjamnya. Sehingga untuk memenuhi modal usaha tersebut mereka melakukan pinjaman ke tukang kredit.

Demikian juga dengan pembantu rumah tangga. Setelah selesai di rumah mereka kemudian pergi untuk bekerja di rumah majikan. Ada yang di sekitar tempat tinggal namun ada juga yang harus ke tempat lain. Untuk itu mereka harus menggunakan sarana transportasi. Upah yang diterima bervariasi karena tidak ada

standarisasinya, tergantung kesepakatan. Berapapun itu yang jelas masih jauh dari kata cukup. Sehingga untuk mendapatkan upah yang lebih besar mereka harus bekerja di dua atau tiga pintu (rumah) setiap harinya. Memang semakin banyak pintu yang mereka kerjakan semakin banyak pula penghasilan yang mereka bawa pulang, namun semakin sedikit waktu yang mereka miliki untuk dirinya. Banyaknya waktu yang mereka pakai untuk bekerja menyebabkan mereka tidak bisa terlibat dalam agenda pembangunan. Hal ini menyebabkan mereka terpinggirkan dari program pemerintah.

Ketiadaan akses dan kontrol terhadap sumber daya menyebabkan mereka terjebak dalam kemiskinan. Padahal mereka sudah berusaha. Begitupun, beban ganda dan berbagai ketidakadilan tersebut tidak lantas menjadikan mereka sebagai perempuan yang pasrah dan menerima keadaan. Sebaliknya, malah mendorong mereka untuk melawan dan keluar dari kemiskinannya. Mereka membentuk sebuah kelompok perempuan yang diberi nama Kelompok Perempuan Lubuk Raya. Melalui kelompok ini mereka berusaha untuk membuka akses agar perempuan dapat terlibat dalam proses pembangunan yang ada. Kelompok yang bermula dari kegusaran seorang petani perempuan yang tidak bisa mengakses bantuan pemerintah ini sekarang telah menjadi alat perjuangan. Secara sadar mereka telah berkumpul dan berupaya agar keluar dari kemiskinannya. Kelompok yang pada awalnya beranggotakan tujuh perempuan ini sekarang telah berkembang menjadi enam puluh orang. Bahkan keanggotannya sudah melebar ke kelurahan yang lain.

Setiap bulannya mereka berkumpul untuk mengakumulasi semua modal yang ada. Melalui kegiatan CU (*credit union*) mereka mengakumulasi modal untuk dapat mengakses permodalan dengan mudah dan murah. Selain mengumpulkan dan

kemudian mendistribusikan uang, CU juga berfungsi sebagai rumah belajar. Melalui kegiatan diskusi tematik mereka mengakumulasi dan mendistribusikan pengetahuan agar dapat mengakses informasi yang berguna untuk perkembangan usaha dan kesejahteraannya.

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengetahui bagaimana perjuangan perempuan di Kelurahan Lubuk Raya melawan kemiskinan. Atas dasar pemikiran tersebut maka saya mengangkat penelitian ini dengan judul “perlawanan perempuan terhadap kemiskinan”.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam tiga hal:

1. Strategi adaptasi perempuan di Kelurahan Lubuk Raya dalam menghadapi kemiskinan.
2. Strategi perlawanan perempuan di Kelurahan Lubuk Raya dalam melawan kemiskinan.
3. Wadah perlawanan yang dipakai perempuan di Kelurahan Lubuk Raya dalam melawan kemiskinan.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk strategi adaptasi yang dilakukan oleh perempuan di Kelurahan Lubuk Raya dalam menghadapi kemiskinan?
2. Bagaimana bentuk strategi perlawanan yang dilakukan oleh perempuan di Kelurahan Lubuk Raya dalam melawan kemiskinan?
3. Apa wadah perlawanan perempuan di Kelurahan Lubuk Raya dalam melawan kemiskinan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk-bentuk strategi adaptasi yang dilakukan oleh perempuan di Kelurahan Lubuk Raya dalam menghadapi kemiskinan.
2. Mengetahui bentuk-bentuk strategi perlawanan yang dilakukan oleh perempuan di Kelurahan Lubuk Raya dalam melawan kemiskinan.
3. Mengetahui wadah perlawanan yang dipergunakan oleh perempuan di Kelurahan Lubuk Raya dalam melawan kemiskinan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat:

1. Memberikan kontribusi secara teoritis bagi perkembangan ilmu antropologi khususnya dalam bidang kajian Antropologi Keluarga dan Gender.
2. Bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan pembelajaran terutama oleh kelompok perempuan.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

THE
Character Building
UNIVERSITY